



KETAWANGGEDE

BULETIN KAHMI FE UNIBRAW



RESENSI
RE-CODE (YOUR
CHANGE DNA)

KAJIAN EKONOMI

Landasan Hukum dan Sejarah BUMN di Indonesia

EDISI I TAHUN 1/2007

Bersatu dan Berkarya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berawal dari nurani untuk selalu berbuat baik, menjaga tali silaturahmi, memelihara idealisme berpikir, mengembangkan bakat dan kemampuan, serta berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pribadi, masyarakat, bangsa dan negara serta agama, maka lahirlahbuletin ini. kebingungan sempat muncul ketika harus memberi nama, hubungan yang lama tidak terjalin dan tersambung kembali dengan Ristanto diambil suatu keputusan memberi nama buletin ini 'KETAWANGGEDE' karena nama tersebut dianggap menyimpan histori tersendiri.

Edisi 1 ini mungkin akan sangat jauh dari harapan, karena terus terang edisi ini main comot sana sini dan sedikit memaksa kepada beberapa kawan. Akhirnya meski dengan sedikit kerepotan buletin ini bisa kami terbitkan. Secara garis besar buletin ini secara kontinyu akan berisi artikel yang berupa kajian-kajian dari kawan-kawan (KAHMI FEUB) dalam segala bidang, baik ekonomi, keIslaman, sosial-budaya, politik maupun bidang lain, baik dari kalangan akademisi, profesional, pegawai negeri sampai pengangguran sekalipun.

Dengan adanya buletin ini kami juga berharap muncul ide-ide segar untuk perubahan dan kemajuan baik itu untuk KAHMI, HMI, maupun masyarakat umum. Semoga sesuatu yang kecil yang kita mulai perbuat hari ini bisa membawa kebaikan untuk saat ini dan masa depan dan semoga buletin ini menjadi jembatan informasi, sarana silaturahmi bail diantara KAHMI maupun KAHMI - HMI.

Barvo KAHMI KOMEK Brawijaya!!!
Yakin Usaha Sampai....

Billahi taufiq wal hidayah wassalammu'alaikum Wr. Wb.

REDAKSI

Buletin ini diterbitkan dengan hati nurani demi kemajuan KAHMI, HMI, Masyarakat, Bangsa dan negara, serta Islam. Dengan dana seadanya dan bentuk apa adanya.

DAFTAR ISI

2 **PENGANTAR**

3 **KAJIAN EKONOMI**
Landasan Hukum dan Sejarah BUMN di Indonesia

6 **DARI MILIST**

10 **KONTAK KAHMI**

15 **POJOK KOMEK**

16 **RESENSI**
RE-CODE
(YOUR CHANGE DNA)
-Rhenald Kasali-

18 **PESAN DAN KESAN**

Tulisan kirimkan ke:
nitis_yw@yahoo.com
atau

Nitis Yuli Waskito
d/a

PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Selatan
Jl. Demang Lebar Daun 375 Palembang

Landasan Hukum dan Sejarah BUMN di Indonesia

Roziq M. Kaelani¹

Dalam konteks pengelolaan BUMN beberapa kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat dirunut berdasarkan kajian legalitas dan kajian historis pengelolaan BUMN dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Perkembangan masalah publik dari waktu-ke waktu yang dihadapi oleh pemerintah (sebagai salah satu aktor kebijakan) harus disikapi secara positif (dengan mengeluarkan kebijakan yang konstruktif) sehingga mampu memberikan kemanfaatan publik yang optimal (implikasi positif bagi kehidupan masyarakat) sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 dan seperangkat aturan pelaksanaannya. Artinya bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat-lah yang menjadi titik tekan paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa contoh kebijakan pengelolaan BUMN yang akan dijelaskan dibawah ini merupakan sebagian implementasi kebijakan publik seperti: (1) kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda; (2) kebijakan sektor perbankan; (3) kebijakan restukturisasi usaha; dan (4) kebijakan privatisasi BUMN. Secara prinsip orientasi kebijakan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam bentuk pemberian layanan publik yang berkualitas dan terjangkau.

Cita-cita bangsa Indonesia yang mendasar tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alenia 4. Secara eksplisit cita-cita bangsa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.

"... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...." (Pembukaan UUD 1945 Alinea 4).

Cita-cita ini secara lebih eksplisit dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menggariskan makna sejahtera sebagai sejahtera secara merata, artinya bahwa

setiap individu bangsa Indonesia berhak menikmati hidup yang sejahtera.

"...Pasal 33:

Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Dalam pasal 33 ayat 2 dan 3, secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian diatas, secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), dimana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak Indonesia merdeka, posisi dan peranan perusahaan negara telah menjadi perdebatan dikalangan *founding fathers* terutama pada kata 'dikuasai oleh negara'. Presiden Soekarno menafsirkan bahwa karena kondisi perekonomian masih lemah pasca kemerdekaan, maka negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Hatta menentang pendapat ini dan memandang bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan transportasi. Pandanga Hatta ini lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, dimana posisi negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan (Rice, 1983).

Posisi dan peranan negara dalam perekonomian nasional pasca kemerdekaan

sangatlah dominan. Argumentasi paling mendasar diperlukannya dominasi dan intervensi pemerintah adalah: (1) situasi negara yang baru lepas dari penjajahan tidak memiliki *social overhead capital* (SOC) sebagai modal pembangunan; (2) Besarnya kerugian dan kerusakan *public utilities* sebagai akibat perang; dan (3) terpinggirkannya pengusaha pribumi sebagai kelas ketiga (setelah Eropa dan Keturunan Arab dan China). Berbagai permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk berperan besar dan melakukan beberapa intervensi untuk mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Usaha menstimulasi perekonomian dalam masa Demokrasi Parlementer diimplementasikan melalui Rencana Urgensi Perekonomian (RUP dan Program Benteng yang ditujukan untuk membantu pengusaha pribumi (Sutter, 1959).

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional adalah dengan mendirikan perusahaan negara dalam bidang infrastruktur yang bersifat monopoli alamiah (*natural monopolies*)² dengan melakukan nasionalisasi (Anspach, 1969). Pemerintah menasionalisasi beberapa perusahaan Belanda dalam bidang infrastruktur vital seperti KLM dinasionalisasi menjadi Garuda Indonesia Airways, *Batavie Verkeers Mij* dan *Deli Spoorweg Mij* dinasionalisasi menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) untuk sektor transportasi dan *Post, Telegraph en Telephone Dienst*/PTT dinasionalisasi menjadi Jawatan Pos, Telegraph dan Telepon yang pada tahun 1961 dirubah menjadi Perusahaan Negara Pos Giro dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965 PN Postel dipisah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional.

Untuk menjaga kesinambungan keberadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pemerintah merubah *Departement der Burgelijke Openbare Werken* menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Banyaknya pergolakan politik dan pemberontakan (instabilitas politik) menyebabkan pemerintah

tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki prasarana publik (Feith, 1962). Upaya perlindungan terhadap pengusaha pribumi juga mengalami kegagalan. Lisensi impor yang diberikan kepada pengusaha pribumi jatuh ke tangan pengusaha Tionghoa dan Keturunan Arab. Kurangnya jiwa wira usaha (*entrepreneurship*) dari pengusaha pribumi mengakibatkan Program Benteng yang ditujukan untuk mendorong dan menumbuhkan perekonomian tidak tercapai (Anspach, 1969).

Demikian halnya dengan kebijakan pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara tidaklah efektif. Pada awal tahun 1950-an, pendirian negara dibatasi pada beberapa sektor vital (sesuai pendapat Hatta), pada tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi hampir semua sektor (sesuai dengan pendapat Soekarno). Kekalahan partai Masyumi dan dan Partai Katolik yang mendukung pendapat Hatta di parlemen terkait dengan Undang-undang Nasionalisasi berimplikasi pada nasionalisasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan Belanda (Anspach, 1969). Nasionalisasi secara besar-besaran ini dapat dipandang sebagai *by accident* dan bukan *by design* (Sukarman, 2003). Padahal, sebagian besar perusahaan Belanda yang dinasionalisasi sudah mengalihkan assetnya ke Belanda (pemerintah banyak menasionalisasi perusahaan-perusahaan boneka yang secara ekonomis sebenarnya tidak memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bahkan dikemudian hari menjadi beban pemerintah), tindakan yang dilakukan oleh pemerintah banyak merugikan negara (membengkaknya anggaran pembangunan dan belanja negara, karena asset BUMN diperoleh dari penyisihan kekayaan negara dari APBN). Kondisi ini diperparah pada saat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menganut Demokrasi Terpimpin³.

Pada masa Demokrasi Terpimpin Pemerintah menasionalisasi kurang lebih 600 perusahaan dimana setengahnya adalah perusahaan perkebunan, lebih dari

seratus perusahaan dalam bidang pertambangan dan sisanya sektor perdagangan, perbankan, asuransi, komunikasi dan konstruksi. Setelah dilakukan restrukturisasi pada akhir masa Demokrasi terpimpin, jumlah perusahaan yang dikuasai oleh negara menjadi 233 perusahaan (Mardjana, 1999). Dalam pengelolaan perusahaan negara ini Presiden Soekarno melibatkan kalangan militer sehingga muncul istilah *entrepreneurial military officer*, oleh sebagian pengamat langkah ini dipandang sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas dan loyalitas militer (Muhaimin, 1989).

Beban pemerintah yang terlalu besar untuk menjalankan perusahaan negara, krisis pangan pada tahun 1961 sebagai akibat gagal panen dan tidak tercapainya kuota impor beras, dan pencetakan uang secara besar-besaran mendorong munculnya hiperinflasi. Pada tahun 1961 inflasi mencapai angka 95 persen dan pada tahun 1965 inflasi mencapai 605 persen⁴. Untuk mengatasi hiperinflasi pemerintah melakukan kebijakan pemotongan nilai uang melalui Penetapan Presiden No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965, dimana nilai mata uang Rupiah turun dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,-. Kebijakan ini jelas merugikan masyarakat secara luas (Sukarman, 2003). Kondisi ini terus memburuk sampai dengan lahirnya pemerintah Orde Baru.

Paradigma pembangunan Orde Baru sebagian besar merupakan antitesis dari Orde Lama. Perbedaan yang nyata adalah bahwa Soeharto menerapkan azas pragmatisme dalam ekonomi yang dijalankan oleh para profesional dengan memperoleh dukungan dari kelompok militer. Glasburner (1971) menyatakan bahwa:

"In the New Order's economic policy, this effort has been characterized by pragmatism, reliance on professional expertise and gradualism".

Dalam konteks pengelolaan perusahaan negara, dalam batas tertentu antara Orde Lama dan Orde Baru memiliki banyak kesamaan, yakni menempatkan perusahaan negara sebagai tulang punggung perekonomian. Dalam pemerintahan Suharto, dominasi perusahaan negara secara

berangsur-angsur dikurangi. Rice (1983) menyatakan:

"Both the Soekarno and Soeharto's governments have declared that the roles of the state owned enterprises and cooperative sectors are important, but the Soeharto's government has moved to decrease the role of the state owned enterprises and has greatly increased the role of private sector (including foreign enterprises) in the economy".

Pragmatisme didefinisikan sebagai tindakan politik yang menitikberatkan pada azas kemanfaatan tanpa terpengaruh oleh ideologi tertentu. Pragmatisme ekonomi ditunjukkan dengan penerapan kebijakan makro ekonomi khas barat (neo-liberal) yang menjadi rujukan strategi pembangunan. Kebijakan ini dipadu dengan keterbukaan pemerintah terhadap arus modal asing dari negara-negara barat (Sadli, 1997). Kebijakan pemerintah untuk memuka diri bagi sektor swasta untuk berperan dalam perekonomian nasional dan mengurangi peran perusahaan negara juga dipandang sebagai wujud pragmatisme (Austin, 2001).

Pandangan pragmatisme perekonomian dipelopori oleh ekonom-ekonom lulusan Universitas California – Berkley atau yang lebih dikenal sebagai Mafia Berkley⁵ atau teknokrat yang menjalankan kebijakan ekonomi liberal (Glasburner, 1971). Pada tanggal 12 April 1966, Presiden Soeharto dengan didampingi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengumumkan haluan ekonomi terbuka yang akan diterapkan oleh pemerintah (Panglaykim, 1968). Secara politis, hal ini ditujukan untuk memperoleh kesan positif, bahwa pemerintah Orde Baru berbeda dengan pemerintah Orde Lama yang cenderung sosialis. Hal ini ditujukan untuk memperoleh simpati Negara-negara Eropa dan Amerika⁶. Kajian dalam bidang ekonomi dengan diketuai oleh Widjono Nitisastro mengeluarkan program stabilisasi dan rehabilitasi. Program ini secara resmi diumumkan oleh Soeharto yang mencakup: (1) penerapan anggaran yang berimbang; (2) neraca pembayaran yang berimbang;

(bersambung ke halaman 12.....)

PENGANTAR

Rubrik ini memuat tulisan teman-teman yang sudah bergabung di mailing list (milist) kahmi-feub yang beralamat di **kahmi_feub@yahoogroups.com**. Tulisan diawali sejak milist terbentuk dan mulai ada anggota (hampir semua tulisan akan dimasukkan, hanya yang dinilai tidak perlu yang tidak dimasukkan). Isi tulisan dan format 90% tetap, hanya beberapa kalimat bawaan yahoo yang dibuang dan sedikit modifikasi. Tulisan disini *dicopy-paste* dari web milist yaitu: **http://groups.yahoo.com/group/kahmi_feub**

Bagi teman-teman yang belum tergabung dan mempunyai serta memungkinka untuk mengakses internet, dimohon bergabung dengan mengirim email kosong ke **kahmi_feub-subscribe@yahoogroups.com** atau kirim email ke **nitis_yw@yahoo.com**.

Subject: Alhamdulillah ada milis kahmi

Pengirim: Nico Andrianto <nicoand02@yahoo.com>

Mon May 1, 2006 8:58 pm

Assalamualaikum wr wb

Salam buat para kakanda dan kawan2 kahmi. Salam dari Kalimantan Selatan. Buat Pak Unti, Pak Iwan Triyuwono, Cak Noval, Cak Dody Maulana, Gus Fath, Nitis, Pak Dosen Lutvi Harris, dll yang tidak bisa saya sebut semuanya. Semoga milis ini bisa tetap menyangbungkan silaturahmi kita.

Wassalam

Subject: surat ahmadinejad ke bush

Pengirim: endiyatmo widagdo <widagdo_e@yahoo.de>

Tue May 16, 2006 10:57 am

surat ahmadinejad ke bush
surat ahmadinejad ke bush, mungkin bisa jadi bacaan karena ini versi indon

Nico Andrianto <nicoand02@yahoo.com> schrieb:

Assalamualaikum wr wb Salam buat para kakanda dan kawan2 kahmi. Salam dari Kalimantan Selatan. Buat Pak Unti, Pak Iwan Triyuwono, Cak Noval, Cak Dody Maulana, Gus Fath, Nitis, Pak Dosen Lutvi Harris, dll yang tidak bisa saya sebut semuanya. Semoga milis ini bisa tetap menyangbungkan silaturahmi kita. Wassalam

Attachment(not stored) *Surat Mahmoud Ahmadinejad ke Bush.pdf*
Type: *application/pdf*

redaksi: pesan berupa attachment

Subject: Please Contemplate

Pengirim: roziq mohammad <roziq_mohammad@yahoo.com>

Fri Jul 7, 2006 9:32 am

Dear, Kahmi FEUB Mailist Moderator

I kindly to thank you for inserting me into Kahmi FEUB mail-list. As an introduction, I send you an article. have we faced all of our problem as simply as possible and able to make the simplest solution?. Please contemplate and thank a lots !!!

Sincerely

**Roziq M Kaelani
(Ex-General Officer of HMI Komisariat Ekonomi'1998-2000)**

Saudara/Saudari mungkin pernah membacanya, tapi tidak ada salahnya artikel ini saya tulis ulang. Selamat membaca dan salam kenal. TERKADANG orang untuk memecahkan problem yang sebenarnya sepele, tetapi karena menyangkut barang mahal atau bersifat sangat krusial, segeralah melakukan tindakan yang terkesan mercusuar. Seolah-olah masalah mahal harus diselesaikan dengan biaya mahal juga.

Padahal kalau mereka mau bersabar mungkin lain cerita. Tidak mustahil mereka akan menemukan solusi dengan biaya murah. Simaklah beberapa kasus berikut ini.

Potlot di Angkasa Luar

Pulpen yang dipakai antariksawan kiriman NASA tidak berfungsi ketika sedang dalam perjalanan ke angkasa luar. Terang saja, gravitasinya nol sehingga membuat tintanya tidak bisa mengalir. Karena kasus inilah beberapa data penting tidak ditulis. Padahal rencananya akan dijadikan bahan penelitian-pengembangan berikutnya di bumi. Memang ia bisa mengingatnya, tetapi tidak sempurna, terutama yang bersifat parameter.

Agar tidak terulang kembali, dikajilah pembuatan pulpen universal, bisa dipakai pada saat gravitasi dan suhu berapa pun. Bukan sampai di situ. Dirancang untuk bisa dipakai lama/ditulis panjang, tanpa perlu isi ulang.

Biayanya tidak sedikit. Mencapai jutaan US dolar. Semua option tinta dan ergonomis manusia di bumi dikaji berdasarkan variabel dimensi.

Lain dengan Rusia. Antariksawannya hanya menggunakan potlot. Cukup dengan menekannya pada lembaran sudah menghasilkan coretan. Lagi pula inti problemnya menyangkut catatan. Tidak ada urusan dengan berbagai instrumen pesawat lainnya.

Para konsumen mengeluh karena merasa lama menunggu saat menumpang lift. Mereka selalu bengong tanpa makna sampai pintu tujuannya terbuka. Apalagi sendirian.

House master memaklumi serta meresponsnya segera. Ia sempat juga mengusulkan agar kecepatan gerakannya ditambah. Berarti mengganti gerbongnya.

Padahal intinya cuman kesal di dalam lift. Karena itu menurut salah seorang rekannya, cukuplah dengan menempelkan aksesoris, seperti cermin bagi mereka yang ingin

merapikan/menyisir rambutnya. Lainnya, buku telepon, denah rute transportasi, sampai media cetak. Yakinlah, perasaan lama pun akan berubah. Malah mungkin terasa sebentar.

Komputer

Dr. Joko meminta Maman membuatkan software pencarian kartu pasien di klinik yang mempekerjakan lima suster dan dua sekretaris.

"Komputer bapak menggunakan program apa?" tanya Maman.

"Oooo ... Windows 98. Emangnya kenapa?"

"Wah ..berarti ada program Microsoft dong?"

"Itu sih lengkap. Malah prosesornya saja sangat tinggi"

"Biasanya Bapak memakai semua itu untuk apa saja?", Maman kembali bertanya.

"Ya untuk bikin surat"

"Selain itu?"

"Ya ... tidak ada. Maklum, sibuk! Banyak pasien datang"

"Begini, Pak! Sebenarnya dengan program itu saja sudah cukup untuk memecahkan problem yang sedang Bapak hadapi"

Maksudnya, mengapa kliennya itu tidak memanfaatkan "Find"? Padahal dengan memanfaatkan tombol Windows (biasanya pada keyboard terletak di baris paling bawah) sudah cukup.

Untunglah Maman masih punya nurani. Tidak memanfaatkan keawaman klien demi memperoleh keuntungan. Akhirnya Maman cukup menyuruh anak buahnya memberi kursus singkat pada beberapa karyawan Dr. Joko. Biayanya pun cuman lima puluh ribu rupiah untuk tiga kali datang.

Coba kalau langsung diiyakan. Bisa-bisa Dr. Joko harus mengeluarkan biaya sampai jutaan rupiah.

Kotak sabun kosong

Seorang konsumen di Jepang mengadukan kotak sabun yang ternyata kosong kepada staf perusahaan yang memproduksinya. Maka terjadilah kehebohan, terutama pada divisi pembungkusan.

Saking paniknya, beberapa manajer menginstruksikan membuat mesin detektor dengan monitor beresolusi tinggi dan berwarna lengkap. Tiada lain untuk mendeteksi semua sabun yang sudah masuk kemasan, jangan sampai yang dianggap sudah siap masuk dus untuk didistribusikan ternyata belum berisi apa pun.

Walaupun satu di antara sejuta buah tetap dianggap bisa mencoreng nama perusahaan. Maklumlah, perlindungan konsumen dan pengawasan barang memunyai lembaga yang sangat ditakuti.

Para teknisi bekerja all out. Anggarannya pun tidak tanggung-tanggung. Belum lagi training bagi operatornya. Sabun hanya bisa dijual setelah melewati alat tersebut.

Tetapi problem yang sama di perusahaan yang lebih kecil, solusinya sangat sederhana. Ini bukan masalah mampu tidaknya ia membeli mesin detektor. Tetapi karena

kenyataannya bisa dilakukan siapa pun. Toh, intinya mendeteksi kemungkinan adanya kotak kosong. Itu saja.

Ia hanya menyediakan kipas angin listrik. Barang elektronik ini cukup diarahkan pada tumpukan sabun, bila ada yang gerak cepat, terbang, atau loncat-loncat, kotak sabun dari bahan kertas itu langsung disingkirkan.

Penutup

Bayangkanlah bila pihak pengambil keputusan pada empat kasus di atas memunyai solusi jauh lebih murah, tetapi pura-pura tidak tahu, sehingga tetap menggunakan solusi dengan biaya yang sangat mahal. Misalkan demi memperoleh atau meningkatkan keuntungan pribadi.

Terlepas legal tidaknya, bermoral tidaknya, atau boleh tidaknya, yang pasti mereka telah melakukan tindakan inefisiensi.

Bagi perusahaan, hendaklah waspada. Bila tampak karyawan bermental seperti itu, tetapi keahliannya sangat diandalkan, hendaklah berpikir panjang atau bersikap cermat sebelum melibatkannya dalam pengambilan keputusan anggaran. Tetapi tetap dalam koridor "manajemen personalia" dan "tindakan bijaksana".***

Mailinglist:

kahmi_feub@yahoo.com
http://groups.yahoo.com/group/kahmi_feub/
 Post message: kahmi_feub@yahoo.com
 Subscribe: kahmi_feub-subscribe@yahoo.com
 Unsubscribe: kahmi_feub-unsubscribe@yahoo.com
 List owner: kahmi_feub-owner@yahoo.com

=====



WORO WORO

Buletin ini menerima tulisan berupa artikel (kajian keIslaman, ekonomi, politik, sosial-budaya dan lain-lain), kritik, saran, surat pembaca, cerpen, puisi, dan karya lainnya.

Kirimkan hasil karya anda ke alamat email: nitis_yw@yahoo.com atau via surat ke:
 Nitis Yuli Waskito d/a PT PLN (Persero)
 Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan,
 Jl. Demang Lebar Daun No. 375 Palembang

- nets -

DAFTAR ALAMAT KAHMI FE UNIBRAW

Data alamat KAHMI FE UNIBRAW akan dimuat secara bersambung. Bagi yang mempunyai informasi mohon memberi informasi.

=====





Kesalahan atau penambahan alamat mohon menghubungi email
nitis_yw@yahoo.com atau posting di milist
kahmi_feub@yahoo.com atau sms.

(....sambungan dari halaman 5)

(3) rehabilitasi prasarana fisik; dan (4) produksi makanan dan pembangunan pertanian (Salim, 1996).

Untuk mendatangkan modal asing, pemerintah mengirim delegasi yang dipimpin oleh Hamengkubuwono IX untuk menghadiri Konferensi Tokyo yang juga dihadiri oleh beberapa Negara Barat seperti Jerman, Inggris, Belanda, Uustralia dan Jepang serta IMF. Pada misi ini mulai ada kesepahaman dengan negara donor untuk membantu Indonesia. Pada Februari 1967, World Bank dan IMF menerima Indonesia sebagai anggotanya (Mas'oeed, 1989). Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus menyetujui komitmen untuk menerapkan ekonomi liberal (Robinson, 1986). Sebagai pelaksana dan kordinator negara donor maka pada tanggal 23-24 Februari 1967 berdirilah *Inter Governmental Group for Indonesia* – IGGI yang diketuai oleh Belanda dengan anggota 16 Negara dan 5 organisasi internasional. Pada tahun 1967 dan 1968, IGGI telah menyalurkan dana sebesar US\$167,3 juta dan US\$ 361,2 juta yang sebagian besar digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah (Posthumus, 1968).

Hasil Pemilu tahun 1971 yang dimenangkan oleh Golongan Karya (Golkar) semakin memantapkan kelompok teknokrat⁷ pada pos-pos penting dalam Kabinet Pembangunan I. Kelompok teknokrat yang sebagian besar bermazhab ekonomi liberal dalam menetapkan kebijakan ekonomi lebih mengedepankan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan melakukan stabilisasi harga (laju inflasi yang rendah). Dalam kondisi tabungan masyarakat yang rendah, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan membuka diri terhadap masuknya modal asing untuk membiayai pembangunan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Dalam prakteknya pemerintah Orde Baru tidak melakukan

kontrol atas arus (masuk dan keluarnya) modal asing dalam perekonomian nasional⁸.

Dalam bidang moneter, pemerintah melalui Bappenas melakukan kordinasi dengan Bank Indonesia untuk menetapkan sasaran makro ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas harga (pengendalian laju inflasi). Kebijakan fiskal dilakukan dengan melakukan kordinasi dengan Departemen Keuangan dengan menutup Defisit Anggaran melalui pinjaman luar negeri melalui IGGI. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemeintah mendorong peran swasta (nasional dan asing) untuk terlibat dalam proses pembangunan melalui serangkaian kebijakan penanaman modal yang menarik bagi swasta. Beberapa paket kemudahan untuk melakukan usaha (bahkan pemberian hak khusus seperti monopoli dan proteksi) bagi pihak swasta. Kondisi kemudian menyuburkan beberapa konglomerat⁹ yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Dalam konteks pengelolaan BUMN, pada awal orde baru, pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yang terdiri dari: dekonsentrasi, debirokrasi, dan desentralisasi. Hal ii ditujukan untuk membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proses pembangunan. Upaya perbaikan kinerja BUMN dilakukan melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara, di mana BUMN dipisahkan berdasarkan fungsi dan peran sosial ekonomisnya yakni Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan Terbatas (Hadianto dalam Subiantoro dan Riphath, 2004). Dalam perkembangan selanjutnya, BUMN di Indonesia mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.

BUMN sebagai salah satu tulang punggung perekonomian (asset produktif yang dimiliki oleh pemerintah) diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam bentuk dividen dan pajak. Pemerintah sangat berkepentingan atas kesehatan BUMN, akan tetapi kenyataannya banyak BUMN yang mengalami kerugian karena pengelolaan

yang tidak profesional dan tidak transparan. Dalam perjalanannya BUMN di Indonesia (pada masa Orde Baru) mengalami tumbuh kembang dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kelompok industri. Perubahan bentuk perusahaan menjadi perusahaan persero mengalami peningkatan yang pesat, dimana pada masa Kabinet Ampera pemerintah hanya memiliki 1 perusahaan persero, pada masa Orde Baru berkembang menjadi sekitar 71 perusahaan persero¹⁰.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan stabilitas harga dan laju inflasi pemerintah memberikan proteksi dan hak monopoli kepada BUMN serta memberikan subsidi yang cukup besar bagi BUMN yang merugi. Kondisi ini menciptakan ketergantungan BUMN kepada pemerintah, sehingga sebagian besar justru menjadi beban bagi pemerintah. Ketergantungan BUMN terhadap pemerintah tidak menciptakan struktur kemandirian BUMN untuk berkompetisi dengan perusahaan swasta, dan seringkali BUMN memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja, kualitas, dan produktivitas karyawan BUMN relatif rendah, jika dibandingkan dengan karyawan perusahaan swasta. Tingginya biaya produksi mempengaruhi tingkat harga produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam kasus tertentu pemerintah memberikan subsidi yang terlalu besar bagi BUMN, sehingga secara internal upaya untuk menciptakan efisiensi dalam tubuh BUMN menjadi makin sulit. Ketidakjelasan peran yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan BUMN tidak mampu mendorong efisiensi dalam BUMN yang bersangkutan. *High cost economy* dalam BUMN yang diantaranya ditunjukkan oleh tingginya biaya tenaga kerja, merupakan salah satu gambaran betapa BUMN belum dapat beroperasi secara efisien.

Penerbitan Undang-Undang tentang BUMN dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pemangku kepentingan (*stake holders*). Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat dirumuskan arah, sasaran, program, dan kebijakan Pemerintah terhadap BUMN secara jelas, sehingga dapat menjadi

pedoman bagi semua pihak yang terkait. Undang-Undang tentang BUMN merupakan kebutuhan mutlak, karena landasan hukum tentang BUMN yang ada sebelumnya belum sempurna. Undang-Undang BUMN tersebut, juga mengatur beberapa ketentuan tentang restrukturisasi dan privatisasi

Krisis Ekonomi tahun 1997 memiliki konsekuensi bagi pemerintah, terutama terkait dengan anggaran dan belanja negara. Beban hutang luar negeri yang jatuh tempo, stabilitas ekonomi moneter yang rapuh, instabilitas politik dan beberapa kebijakan pemerintah yang lebih memberikan perlindungan kepada konglomerat¹¹ menjadikan beban pemerintah semakin besar. BUMN sebagai salah satu pundi (*cash cow*) yang dimiliki oleh pemerintah diharapkan dapat membantu kebutuhan anggaran dan belanja negara baik melalui kontribusi dividen, pajak ataupun privatisasi. Pada pemerintahan Megawati, privatisasi dilakukan secara cepat (*fast-track privatization*)¹² hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui *strategic sale*) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

References

- Anonymous, 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Anonymous, 1993, Laporan Pertanggung Jawaban Presiden RI dalam Sidang Umum MPR-RI 1 Maret 1993, Jakarta.
- Anspach, Ralph, 1969, Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia, Cornell University Press, Ithaca, USA
- Arief, Sritua, 1998, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDES, Jakarta.
- Arndt, H.W, 1971, Banking and Hyperinflation and Stabilization dalam Bruce Glasburner (ed) The Economy of Indonesia, Selected Reading, Cornell university Press, Ithaca, USA

- Austin, Ian, 2001, *Pragmatism and Public Policy in East Asia, Origin Adaptation and Development*, Fairmont International, Singapore.
- George, Susan, 2000, *A Short History of Neoliberalism*, dalam Walden Bello, Nicola Bullard, and Kamal Malhotra (ed.), *Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets*, Zed Books
- Glasburner Bruce, 1971, *The Economy of Indonesia*, Selected Reading, Cornell university Press, Ithaca, USA
- Rice, Robert C., 1983, *The Origin of Basic Economic Ideas and their Impact on New Order Policies*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 19, No. 2, Agustus, Jakarta
- Panglaykim, Jusuf, 1968, *State Enterprises: Recent of Development*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, No 9, Jakarta
- Prawiro, RADIUS., 1998, *Indonesia's Struggle for Economic Development Pragmatism in Action*, Oxford University Press.
- Posthumus, G.A, 1968, *The Inter Governmental Group on Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, No 8 Juli, Jakarta
- Sadli, Mohammad, 1997, *Technocratic Decision Making in Economic Policy* dalam Moh Arsyad Anwar, Aris Ananta dan Ari Kuncoro, *Widjoyo Nitisastro 70 Tahun: Pembangunan Nasional: Teori Kebijakan dan Pelaksanaan*, Fak. Ekonomi Universitas Indonesia
- Salim, Emil, 1996, *Recollection of My Career*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol 33 No. 1, April 1996.

Catatan Kaki:

- ¹ Konsultan dan Peneliti Independen, Eks Ketum HMI Komisariat Ekonomi periode 1998-2000.
- ² Anspach (1969) menggunakan istilah *natural monopolies* sebagai jenis usaha dimana modal yang dipergunakan biasanya lebih besar dari penerimaan yang akan diterima, sehingga swasta tidak akan mau beroperasi pada sektor

ini. Dalam situasi seperti ini hanya perusahaan Negara yang dapat melakukannya. Dalam pemahaman saya, *natural monopolies* juga disebabkan oleh adanya tuntutan layanan publik, sehingga hal ini menjadi kurang menarik bagi swasta dalam konteks maksimalisasi keuntungan.

- ³ Dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin, pandangan dan pemikiran Soekarno lebih dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Blok Timur (komunis) seperti Soviet dimana peran Negara dalam menggerakkan perekonomian sangat dominan.
- ⁴ Angka inflasi diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (HW, Arndt, 1971).
- ⁵ Kelompok ii dipelopori oleh Widjoyo Nitisastro, Ali Wardhana dan Emil Salim yang secara intens melakukan diskusi kelompok dengan mahasiswa Indonesia untuk menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia, (Jusuf, 2005).
- ⁶ Meningkatnya Kepercayaan Negara-negara Barat dan Amerika terhadap Indonesia, diharapkan akan mendorong kepercayaan investor asing maupun negara donor untuk berinvestasi dan memberikan pinjaman bagi Indonesia.
- ⁷ Penempatan kelompok teknokrat dalam Susunan Kabinet Pembangunan I dapat dilihat dalam Keppres No 64 Tahun 1971. Dalam konteks politik internasional penempatan teknokrat yang berhaluan liberal ini diharapkan akan memperoleh dukungan dari negara donor dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan ekonomi liberal sebagaimana disyaratkan oleh IGGI.
- ⁸ Lemahnya kendali pemerintah ini mengakibatkan Indonesia memiliki pinjaman luar negeri yang cukup besar dimana sebagian besar dilakukan oleh swasta (konglomerat). Pada pertengahan tahun 1997 besarnya pinjaman luar negeri yang mulai jatuh tempo ini mendorong spekulasi mata uang untuk melakukan aksi beli mata uang asing sehingga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, termasuk di beberapa negara Asia.
- ⁹ Seperti Salim Group, Humpuss Group, Bimantara Group, Bakrie Group, Sinar Mas Group dan masih banyak lainnya.
- ¹⁰ Lampiran Pidato Pertanggungjawaban Presiden di depan Sidang Umum MPR-RI 1 Maret 1993.
- ¹¹ Kebijakan pemerintah untuk mem-*bail-out* hutang swasta melalui kebijakan restrukturisasi hutang dan pendirian BPPN, pada akhir pemerintahan Orde Baru menjadikan tanggungan atau beban pemerintah dalam APBN semakin besar.
- ¹² Beberapa perusahaan yang diprivatisasi (*fast-track privatization*) dalam pemerintahan Megawati dapat dilihat dalam Master Plan BUMN 2002-2006 dan Laporan Pertanggungjawaban Menteri BUMN tahun 2004 yang dijabat oleh Laksamana Sukardi.

KOMEK TODAYS

Setelah menempati komisariat di jalan Watugilang III/12c selama kurang lebih 2 tahun, kini Komek bersiap-siap untuk pindah menuju sekretariat yang baru. Peralnya sekret lama tersebut akan direnovasi oleh pemiliknya sehingga mau tidak mau penghuni harus henggang. Menurut berita yang diterima dari pengurus dan penghuni Komek, sekret baru tersebut ukurannya lebih kecil, dan masih dalam area sekitar ex DT.

Di tengah persiapan "evakuasi" ini, Komek (hampir secara bersamaan dengan beberapa komisarita lain) sedang menggelar hajatan rutin tahunan, yaitu RAK –forum tertinggi di komisariat– yang dimulai sejak tanggal 1 Maret 2007 malam. Sampai berita ini diturunkan RAK sudah sampai pada sidang komisi. Dari pantauan jarak jauh diberitakan bahwa suasana RAK cukup ramai. Beberapa KAHMI "turun gunung" dalam rangka meminta pertanggungjawaban pengurus periode 2006 – 2007. Kabarnya, budaya "gertak" –yang cukup berdampak positif terhadap kinerja pengurus– masih mewarnai RAK sekarang.

Permasalahan seputar RAK kali ini –selain kehadiran anggota yang minimalis serta perdebatan yang kurang ideologis & substantif– adalah kelangkaan calon formatur yang akan maju dalam pemilihan. Bahkan dikabarkan bahwa beberapa personel merasa keberatan jika dicalonkan. Ini adalah kondisi yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun terakhir. Ada kesan bahwa Komek kekurangan kader.

28 Maret 2007 mendatang, Fakultas Ekonomi Unibraw juga akan menggelar pemilu FE. Sayangnya, ajang pemilihan presiden mahasiswa ini tidak akan diramaikan oleh kontestan dari Komek. Padahal selama ini Komek tidak pernah absen dalam hajatan akbar mahasiswa FE tersebut.

Benarkah Komek sudah mandul dalam kaderisasi? Mungkinkah beberapa tahun ke depan eksistensi Komek akan berakhir? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab bersama.

(jyd_150307)

Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

- Nabi Muhammad SAW -



Judul Buku : **RE-CODE (YOUR CHANGE DNA)**
 Membebaskan Belenggu-belenggu untuk Meraih Keberanian dan Keberhasilan dalam Pembaharuan

Penulis : Rhenald Kasali
 Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
 Tebal : ix + 270 Halaman
 Harga : Rp. 150.000,- (Toko Buku Gramedia)

Bayangkanlah suatu saat Anda diajak masuk ke dalam wilayah yang sama sekali asing, kemudian Anda diminta berjalan dengan meninggalkan setiap rumusan, baik yang diberikan orang lain, yang diajarkan oleh buku-buku, maupun pengalaman masa lampau, beranikah Anda?

Mungkin, itulah hal yang paling menakutkan bagi sebagian besar dari kita. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada yang berani melangkah masuk ke dalam wilayah yang masih asing, cuma tak banyak yang mau melakukannya. Begitulah dengan perubahan (change), topik yang banyak dibicarakan. Berdasarkan data tahun lalu di amazon.com terdapat 56.170 buku dengan judul change, sekitar 11.195 judul tentang business change, dan 2.404 judul tentang global change. Tidak terhitung lagi ada begitu banyak artikel tentang perubahan, baik yang dibahas di berbagai media cetak maupun berbagai jurnal ilmiah.

Berbeda dengan ilmu pemasaran dan keuangan, Manajemen Perubahan adalah sebuah bidang yang sarat dan kental dengan filsafat, bahkan semenjak dulu kala, tokoh-tokoh terkemuka Yunani kuno sudah mempersoalkannya. Seperti halnya dengan para eksekutif yang gagal membaca tanda-tanda perubahan, mereka para filsuf pun bisa saja salah. Permenides (+/- 800 SM), misalnya, adalah filsuf yang mengatakan bahwa "perubahan adalah tidak mungkin" ('hen ta panta'). Namun, kemudian pandangan yang agak berseberangan muncul dari filsuf Heraclites (+/- 530 SM) yang sangat terkenal dengan ungkapan 'panta rei', artinya "segala sesuatu mengalir, berubah". Sekalipun matahari bersinar setiap hari, yang disinarnya berubah dari waktu ke waktu. Bahkan, sungai yang mengalir setiap hari pun berubah sehingga Anda tidak pernah merasa sama ketika melewati sungai yang sama dua kali.

Berbeda dengan filsuf klasik, para filsuf zaman modern melihat perubahan dengan berbagai angle, antara lain Comte dan Spencer yang melihat perubahan sebagai bagian dari kehendak atau aturan alam (life cycle). Sementara itu, Darwin dan Mendel melihat perubahan dari kacamata biologi serta mempelajari bagaimana makhluk hidup berevolusi, bersaing untuk mempertahankan kehidupan dan tak berdaya mengahdapinya. Atau, Karl Marx melihat dari kacamata konflik atau Hegel yang melihat adanya pluralisme di antara manusia (dialektik), sampai pada sosiolog Weber yang melihat perubahan dari kacamata perencanaan, dan kemampuan untuk melihat jauh ke depan (teleologi). Keempat filosofi ini telah turut memberikan kontribusi terhadap pengertian kita tentang terjadinya proses perubahan serta bagaimana menyiasatinya.

Genetika perilaku

Angin perubahan memang telah terjadi bila kita cermati apa yang dilakukan para ahli perilaku organisasi saat ini. Mereka mulai memfokuskan pada DNA, yakni unsur pembawa sifat berbentuk molekul yang menyimpan informasi tentang gen seseorang. Informasi ini disimpan dalam bentuk sandi berupa kode genetik. Para ahli genetika mulai masuk ke cabang baru dari genetika biologi, yakni genetika perilaku (behavioral genetics), karena berdasar sejumlah penelitian mutakhir terungkap adanya pengaruh genetika terhadap perilaku perubahan.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh salah satu perusahaan konsultan terkemuka Booz/Allen/Hamilton antara Desember 2003 dan November 2005 yang melibatkan responden sebanyak 30.000 dan mewakili 23 industri di 100 negara merupakan salah

satu penelitian yang memfokuskan pada isu "DNA organisasi" untuk mengukur tingkat kesehatan dari setiap perusahaan. Hal ini justru memperlihatkan arah kecenderungan dan keyakinan yang semakin mengental di kalangan para konsultan bisnis dan praktisi terhadap peran dan pengaruh dari DNA organisasi dan individu terhadap perubahan.

Dengan berbekal empat filosofi manajemen perubahan yang diramu dengan berbagai lintas disiplin ilmu serta melalui sejumlah pengalaman empiris, baik melalui dialog-dialog, melihat langsung, ataupun dengan cara mengendus apa yang tengah terjadi di berbagai kota di belahan bumi yang lain, Rhenald kemudian merangkainya ke dalam sebuah konsep yang disebut sebagai "Re-Code DNA".

Model perubahan "Re-Code DNA" bertolak dari lima komponen pembentuk DNA perubahan, "the big five", (Costa & McCrae, 1997) yang dikenal dengan akronim OCEAN, yakni keterbukaan pikiran (Openness to Experience), keterbukaan hati dan telinga (Conscientiousness), keterbukaan diri terhadap orang lain (Extroversion), keterbukaan terhadap kesepakatan (Agreeableness), dan keterbukaan terhadap tekanan-tekanan (Neuroticism). Kelima komponen pembentuk kepribadian ini merupakan benih yang baik untuk melakukan perubahan. Tokoh-tokoh perubahan dunia, antara lain Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Abraham Lincoln, dan para nabi besar, semua memiliki karakter dan kepribadian di atas.

Manusia baru

Alur pikir dalam buku ini mengacu pada pola pikir Re-Code bahwa betapa pentingnya kita semua berfokus pada manusia yang menjalankan perubahan itu sendiri, bukan pada alat-alat atau masalah yang kita hadapi (first who then what). Sehebat apa pun konsep bisnis, tanpa memberi perhatian pada cara orang-orang berpikir, hasil akhirnya akan mengecewakan. Kalau diibaratkan layaknya sebuah bongkahan es, hasil akhir adalah bongkahan es yang berada di atas permukaan air, sedangkan modal dasar seperti proses berpikir, perilaku, emosi dan karakter serta cara berpikir tak tampak di permukaan air. Kalau kita ingin memperbaiki kinerja kita, jalan terbaik yang harus kita lakukan adalah dengan menyentuh karakter dan cara berpikir.

Buku ini bertolak dari satu pertanyaan sentral "mengapa perubahan dirasakan sulit?" Dari sini kemudian Rhenald merangkainya dengan akar penyebabnya dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi semua ini dengan "Re-Code DNA", yakni mengapa kita perlu menata ulang atau membentuk kembali kode-kode sebuah sel pembentuk sebuah organ agar organ itu dapat menjalankan fungsinya seperti yang kita inginkan. Kode-kodenya ditata kembali untuk melahirkan manusia-manusia baru pembentuk sebuah komunitas agar "fit" dengan kebutuhan zaman, baik dalam cara berpikir maupun memimpin.

Begitulah, kemudian melalui buku ini Rhenald pun bertutur dan mengalir menyentuh berbagai aspek yang terkait dengan persoalan sentral "Re-Code", mulai dari proses seleksi alam, bagaimana interaksi antara Change DNA dan lingkungan, para individu dengan Change DNA yang unggul, bagaimana Re-Code The Leader, serta menghancurkan belenggu organisasi dan rahasia membangun change agents, sampai pada bagaimana melihat dengan pikiran dan ajakan agar semua orang harus berpikir.

Selain mengangkat sebuah isu yang hangat, boleh dikatakan buku ini dirancang secara serius dengan memerhatikan empat hal pokok untuk membuat pembaca dengan cepat bisa melakukan ekstraksi dari apa yang dibaca, yaitu cerita (kasus), konsep (teori), strategi, dan filosofi. Seperti layaknya sebuah fieldbook, pembaca akan menemui sejumlah ikon yang sangat membantu sebagai panduan dalam buku ini. Buku ini memang terbilang apik karena desainnya dirancang dengan khusus untuk memanjakan mata pembaca melalui tipografi huruf, warna, dan ilustrasi yang kesemuanya menyatu dengan konsep dasar dalam buku ini, yakni "Re-Code", sehingga ketika membaca kita pun ikut mengalir seperti perubahan itu sendiri.

Roy Goni (Pengajar Pemasaran pada Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta)
<http://www.kompas.co.id/>

Apa Kabar Komek???

Masih ingatkah kita dengan Komek Brawijaya? Masih ingatkah kita dulu, sewaktu masih aktif disana, begitu sulit (mungkin juga malu) bila sudah menyangkut masalah dana. Setiap kali ada kegiatan, entah itu LK, RAK atau kegiatan-kegiatan lain, kita selalu kesana kemari 'sowan' KAHMI untuk memobilisasi dana (na gitu kok ya mau-maunya mas-mas mbak-mbak itu dimintai dana ya? hehehehhe). Belum lagi masalah kontrakan 'istana' komek, 'bener ga Pak Roziq?' Mungkin jaman saya dulu masih enak, karena pemilik rumah (Mas Heri) masih sering memberi toleransi dalam hal pembayaran.

Apa permasalahan hanya sampai disitu, masih ingatkah (Pak Roziq, Bang Iwan, Om Roni, Om Imron, Ical 'duro', Pak Nico) air macet karena pipa diblokir PDAM? Dan dgn sedikit kreatifitas saya mencoba 'memberi contoh' mengalirkannya kembali (jadi merasa bersalah). Belum lagi berapa kali kita bercandle light karena listrik diputus PLN (sorry my Company, itu dulu).

Permasalahan keuangan memang menjadi permasalahan klasik bagi komek, karena sampai sekarang pun kondisi itu masih dialami oleh adik-adik kita. Baru-baru ini ada keluhan, hampir saja komek bernasib sama ketika Mas Nanang menjabat Ketum (bermarkas di petak kamar kost), tapi alhamdulillah hal itu bisa dihindari, komek baru saja 'boyongan'.

Berkaca dari kondisi semacam itu, apa tidak sebaiknya kita memikirkannya? Bagaimana seandainya komek punya sumber penghasilan rutin (bukan dari hasil meminta-minta)? Mereka punya usaha (bukannya orang ekonomi belajar bisnis?), meskipun bukan milik komek mungkin mas-mas atau mbak-mbak yang mempunyai usaha bisa melibatkan adik-adik komek (bukan hanya menunggu ada proyekan). Mungkin dengan cara menghidupkan lembaga kekayaan di komisariat, artinya dibesarkan di komisariat seperti LKMI di Kedokteran. Ya... ini juga usul, sumonggo ditanggapi...yakin usaha sampai!!!

Nitis Yuli Waskito

(Mantan Ka. Bid. Kekayaan Komek UB 2000-2001)

Di Komisariat Dulu Banyak Majalah Sabili

Rekan rekan HMI yang baik,

Berikut ini adalah tulisan kecil dengan kenangan serunya beraktivitas di HMI sekitar 96-99an. Di komisariat HMI dulu cukup banyak majalah SABILI. Pemiliknya bang Noval Adib [bapak dosen kita di FEUB yang sedang menempuh S3 nya di Pulau Pinang, USM, Malaysia] yang waktu itu menjadi ketua komisariat. Konon setelah bang Noval tidak di komisariat lagi, majalah Sabili juga tidak pernah nampak lagi di sana. Salah satu majalah yang berpihak pada upaya pembelaan umat Islam yang termarginalkan. Salah satu berita yang membuat hati saya bergejolak adalah berita tentang maraknya kristenisasi di kampus UI. Terutama sekali berita Wawah. Seorang gadis madrasah aliyah asal Padang bernama asli Niswah, putri seorang dosen IAIN yang "konon" dihipnotis, diculik, dikristenkan, di bawa ke gereja di Jawa secara gerilya. Bahkan keperawanannya sudah pulak direnggut. Waks. Ini kan benar benar keterlaluan. Rasa keadilan saya sangat tergoncang dengan berita ini. Saya lihat sampai sekarang pun masih banyak netters yang teringat dan terkenang selalu dengan kekejian kasus Wawah.

Sebuah kasus, kalau dipikir pikir lagi, menurut saya agak aneh. Karena meskipun Wawahnya sudah ditemukan, namun tidak ada wawancara langsung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Orangnya juga tidak pernah diwawancara secara live. Tingkat kemisteriusan beritanya, mirip dengan desas desus kristenisasi di kampung Lio, Depok baru baru ini yang juga dilansir oleh Sabili. Kalau dipikir pikir lagi, terkadang umat kita sering membuat berita yang sifatnya bombastis, namun pemberitaannya tidak mampu memenuhi azas berimbang dalam pemberitaan dengan cara menampilkan berita secara cover both side.

Belakangan anak PKS yang dekat dengan saya dan berfungsi menjadi musrif musrifan - saya ndak pernah terlibat dalam ikatan taklim beneran- [mas Chandra Mundiyanu] justru mengatakan kalau majalah ini tidak favorable. Terlalu kuat nuansa politisnya, dan terlalu banyak orang PII nya di redaksinya. Heuh aku ndak ngerti deh gitu. Yang disarankan saat itu adalah majalah tarbawi. Tentang politik nanti, akan ada majalah yang lebih islami yang akan terbit. [ternyata belakangan rekan rekan tarbiyah bikin KAMMI, terus dilanjut bikin partai politik-PK].

Diskusi Keislaman di HMI Kala itu

Demikianlah Sabili di masa tahun 97. Aku dulu pegang kajian kebangsaan bareng mas Dema [acaranya diskusi rutin dgn pembicara dari kalangan dosen yang alumni HMI], toh berita politik dan dinamika pemikiran islam yang lagi marak model wacananya HMI Ciputat dan seterusnya lewat begitu saja dan terasa asing. Maklum para dosen di Malang, meskipun dulu banyak yang terlibat pergerakan, wacananya adalah wacana tahun 60-80an.

Paling cuman baca buku tokoh muda gerakan islam yang isinya profil Nong Darul Mahmada, Nurul Agustina, Hamid Basyaib, Budi Munawarrahaman, Miranda Risang Ayu [favorit saya malah mbak gur itu - dia menarik banyak simpati, karena hasil konversi dari katolik ke Islam, dari anak gaul yang suka merokok, berubah jadi akhwat cantik :], dari yang cuek bebek, jadi orang yang concern ke pendidikan anak]. Lucu jadinya ketika ketemu orang yang sama sama kenal Miranda. Yang satu anak hukum unpad, akhwat juga. Satunya lagi, cowok, sama seperti miranda kuliah di UTS - Univ Teknologi Sidney, sering ke Rumah Miranda, malah gak ngefans sama sekali. "Biasa aja tuh", katanya :p hahahha. Begitulah hasilnya kalau dipotret dari jarak terlalu dekat. Kesan biasa juga melekat pada anaknya Amin Jamaludin [itu lho, bossnya LPPI (anak perusahaan DDII) yang dulu bikin heboh dengan pengusuran orang Ahmadiyah bareng orang FUJ, HT dan FPI], biasa aja gitu orangnya. Kecil, kurus, banyak senyum. persis ama fotonya di media massa waktu jadi korlap pengusuran.

Saat itu [97], mulai banyak ikut kegiatan lintas kampus. Ikut seminar tentang gender di IAIN Malang toh dengan impresi, para dosen di PSW (pusat studi wanita) itu terlalu mengada ada. Welah dalah. Baru ketika tahun 98-99 banyak mengulik pisau analisis gender, rada ngerti. Ada sesuatu yang salah yang terkonstruksi di masyarakat kita. Itu pun ideologis, ketika bukunya pak Yunahar Ilyas [dari tesis dia yang membabat Aminah Wadud Muhsin, dll dihadapkan dengan tafsir Ibnu Katsir], aku melok [ikutan] pak Yunahar Ilyas. Diskusi masalah gender jadi agak matang ketika sejak tahun 2002, tempat kerja saya memberi saya email. Bisa mulai ikutan milisan :) tahun 2003 awal, mulai intens dengan milis wanita-muslimah dan milis apa kabar.

Banyak hal-hal yang sebelumnya saya rasa sudah jadi patokan pasti, ternyata terbongkar dan jadi terlihat rentan. Ujungnya saya merasa perlu melakukan dekonstruksi dan pencarian keseimbangan baru dalam diri saya [sesuatu yang dimulai sejak perkenalan dengan HMI dan komisariatnya yang waktu itu di Watu Gilang 17b]. Masjid depan komisariat benar-benar melting pot, dimana berbagai aktivis, sebut saja mulai jamaah tabligh, Salafy, Tarbiyah, HT, anak PII, anak HMI dan PMII sering sekali mengadakan kegiatan. Saya yakin masyarakat kita juga terkondisi melakukan banyak hal untuk lebih memahami dirinya sendiri sejak reformasi mulai bergulir.

Akhir kata. Thanks to Sabili, rekan-rekan PKS dan Hizbut Tahrir, dan kritik dalam pada Gusdur yang oleh beberapa kalangan sering dikatakan otakny seperti tahi, dan kang Jalal yang disamakan dengan dajjal [hwarakadah !!!]. Semua wacana alternatif itu membangun awareness saya, akan cara-cara umat Islam saat itu melakukan pertahanan diri secara minimal. Pendek kata saya berharap, ada cara merespon kondisi kekinian dengan polemik dan cara yang lebih beradab dan Islami. Adakah itu di HMI hari ini ?

Ari Condro (Arcon)

(KAHMI - FE Ak 95, sekarang tinggal di Bekasi)

*cahaya lilin indah namun redup
hemat energi listrik agar tetap terang dan indah*



matikan 2 lampu jam 17.00 - 22.00 WIB



Disponsori oleh:

PT PLN (Persero)

listrik untuk kehidupan yang lebih baik